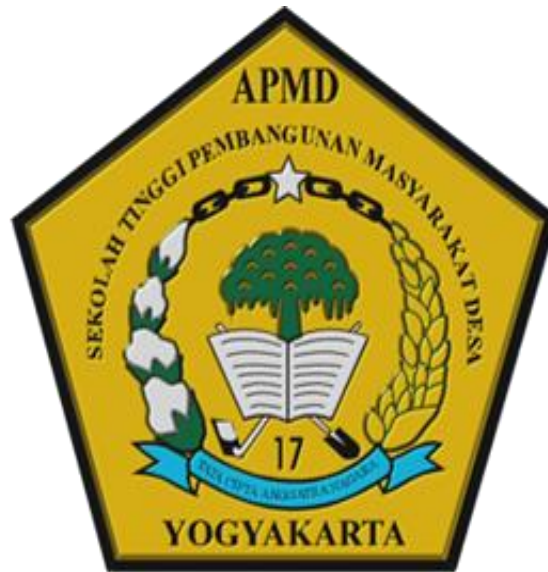


SKRIPSI

**KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DESA SEBAWANG MENUJU
SMART VILLAGE**



Disusun oleh :

MARKO

18520190

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DESA SEBAWANG MENUJU
SMART VILLAGE**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata – 1
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

Disusun Oleh :

Marko

18520190

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2023

Waktu : 8.30

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD ”APMD” Yogyakarta

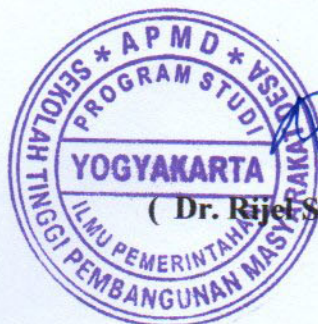
Nama

1. **Dr.Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si**
Ketua Penguji/Dosen Pembimbing
2. **Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si**
Penguji Samping I
3. **Dr. Rijel Samaloisa**
Penguji Samping II

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DESA SEBAWANG MENUJU SMART VILLAGE.” adalah karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Semua data yang saya gunakan benar adanya dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis



Marko

HALAMAN MOTTO

**“Hidup Adalah Sepuluh Persen Dari Apa Yang Terjadi
Padamu Dan Sembilan Puluh Persennya Adalah Bagaimana
Kamu Menanggapinya.”**

-Lau Holtz

**“Segala Perkara Dapat Ku Tanggung
Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku”**

-Filipi 4 : 13

Aku Percaya

**“Kemanapun Aku Melangkah Apapun Keinginan Ku
Dan Dimanapun Masa DepanKu, Semua Sudah Tuhan Rencanakan Dengan Baik.”**

-Tumblr Kristen

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur dengan penuh kerendahan hati saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan berkatnya selalu senantiasa melindungi, menjaga siang dan malam. Dan yang selalu memberikan hikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya kepada semua orang yang selama ini tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, semangat, kekuatan, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari pengarahan, bantuan dan dukungan maupun doa dari berbagai pihak, terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada kedua orangtua terkasih saya Bapak Joko dan Ibu Sarah yang selama ini tidak pernah bosan-bosannya mendidik saya dengan sangat baik dan penuh dengan kasih sayang yang luar biasa sampai dengan saat ini. Terima kasih atas semua doa, bimbingan, dan rasa percaya yang diberikan selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk bapak dan ibu yang sangat saya sayangi terima kasih atas semua pengobarnan dan dukungan selama ini kepada saya, yang selalu berkerja keras, memberikan semangat, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan dukungan selama ini kepada saya, yang selalu berkerja keras, memberikan semangat, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya sampai dengan sekarang begitupun dengan hal yang saya butuhkan selama ini. dan terim kasih selalu menjadi super hero maupun panutan terbaik dalam bagaimana menjalanin kehidupan selama ini. Skripsi ini tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu berikan selama ini kepada saya. Terima Kasih buat bapak dan ibu yang selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa dan memberikan energi maupun semangat sampai dengan sekarang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak dan juga adik saya, Sryanti dan juga Revaldi yang selama ini selalu saling mendukung satu sama lain dalam segala hal dan selalu mensupport, memberikan semangat, dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Dosen pembimbing pertama saya Ibu Tri Daya Rini, M.Si dan juga untuk Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing pengganti yang baru. Terimakasih telah sabar membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati Bapak dan ibu, tanpa bimbingan bapak dan ibu saya tidak mungkin bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas kebaikan dan kemurahan hati bapak dan ibu semoga selalu dalam lindungan Tuhan.

Terima kasih juga kepada Wawan, Leo, Kontes, dan juga Dody yang telah menjadi sodara tak sedarah begitupun dengan teman-teman kosan yang saling mendukung, memberi semangat, dan juga saling memotivasi satu sama lain sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga selama menempuh bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang maha Esa atas berkat dan kasih anugerahnya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DESA SEBAWANG MENUJU SMART VILLAGE.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa maupun bimbingan atau saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi di STPMD.
2. Bapak Dr.Rijel Samaloisa Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mempermudah penulis dalam urusan administrasi penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan pikiran serta meluangkan waktu guna membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan juga Pengetahuan selama menempuh bangku perkuliahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh Karyawan atau Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Sebwang yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi ruang,dan juga tempat untuk berdiskusi selama penulis melakukan penelitian
7. Almamater kebesaran terima kasih atas jasa mu dalam setiap perjalanan selama menempuh teori dan penyelesaian pekuliahan.

8. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah menjadi keluarga besar bersama

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis

Marko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Fokus Penelitian.....	8
F. Literatur Reivew	8
G. Kerangka Konseptual.....	12
1. Implementasi.....	12
2. Pengertian Desa	17
3. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.....	18
4. Governability	23
5. Kapasitas Sumber Daya Manusia	27
6. Smart Vilagge	31
H. Metode Penelitian	35
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	41
A. Sejarah Desa Sebawang	41
B. Kondisi Desa Sebawang.....	44
C. Kondisi Demografi Desa Sebawang	45
D. Keadaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	48

E. Pemerintah Desa Sebawang	51
F. Fasilitas Pendukung Smart Village diDesa Sebawang	56
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Deskripsi informan.....	60
B. Analisis Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebawang Dalam Mengimpelmentasikan Digitalisasi Program menuju Smart Village.....	63
1. Faktor Komunikasi.....	63
2. Sumber Daya.....	66
3. Disposisi.....	72
4. Struktur Birokrasi.....	74
C. Analisis Pelaksanaan Program Smart Village Pemerintah Desa Sebawang.....	76
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Smart Village Pemerintah Desa Sebawang	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama-nama Kepala Desa.....	43
Tabel 2.2 Batas wilayah Desa Sebang 44	44
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Sebang 45	45
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan..... 46	46
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkerjaan..... 47	47
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia..... 48	48
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 49	49
Tabel 2.7 Jumlah Kepala Keluarga 49	49
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Pendukung 58	58

INTISARI

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah Desa sebagai unsur aparatur pemerintahan Desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting didalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat desa. Pengembangan program smart village tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi informasi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan Desa menjadi lebih baik dan kesejahteraan dengan maksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dan dasar program Smart Village adalah undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa definis Smart Village sesuai dengan pasal 78 UU Desa dan UU Desa pasal 86. dan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka akhirnya teretusnya suatu program kebijakan yang bernama program *smart village* ini. Program ini suatu inovasi pemerintah dalam memanfaatkan suatu teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparansi, akuntabel dan lebih efektif serta efisien.

Jenis Penelitian dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang berlokasi di Desa Sebangang dengan situsnya berada di Desa Sebangang. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan purposive sampling yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan yang ingin dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kesiapan sumber daya aparatur desa dalam mengimplementasikan digitalisasi program dalam pelayanan publik dan juga peningkatan kualitas penggunaan digital bagi aparatur Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah berupaya melaksanakan dan memberikan pelayanan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori oleh George Edward (2011) dalam (Widodo (2011:96-110) melihat implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, dimana banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi itu sendiri. kepada masyarakat dengan adanya pelayanan digitalisasi yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu adanya komitmen pelaksanaan program pemerintah Desa Sebangang dengan masyarakat melalui komunikasi, dan juga dukungan maupun bantuan dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan juga didukung dengan kegiatan sosialisasi-sosialisai dan pelatihan bimtek dengan program Smart Village. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Smart Village yaitu perlu adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan pemerintah desa sebangang dan juga masih kurangnya pemahaman dari masyarakat Desa Sebangang. Untuk itu pemerintah Desa Sebangang perlu melakukan perbaikan peningkatan terhadap hambatan yang ada dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga kedepannya pemerintah Desa Sebangang semakin baik dalam melaksanakan penerapan program Smart Village dan juga meningkatkan potensi desa yang ada dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sebangang.

Kata Kunci : *Kesiapan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Program Smart Village*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sistem pemerintahan taraf paling rendah yang memiliki peran paling penting dalam pengembangan nasional, serta stabilitas nasional. Tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya jumlah desa di Indonesia merupakan salah satu tantangan dalam perkembangan desa.

Dalam UU Desa nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. dan juga sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal (25) bahwa “pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain” tentunya untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang prima tidaklah mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna melakukan pelayanan yang baik. Melalui perkembangan sistem informasi desa perlu ditetapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia sebagai organisasi formal yang memiliki peran terdapat dalam konteks berbangsa dan bernegara baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Dengan adanya Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga daerah itu sendiri (*Desentralisasi*). Demikian halnya dengan desa, bahwa Pemerintah Desa berkewenangan melakukan perkembangan dalam pelayanan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perkembangan teknologi bukan hanya dapat di manfaatkan oleh masyarakat kota namun juga oleh masyarakat perdesaan, masyarakat desa juga mulai tidak asing lagi dengan telepon seluler, internet dan lain-lain (*Jimi Asmara 2019,1-2*).

Maka perlu adanya Sumber daya manusia yang berkualitas (*SDM*) merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan dan profesionalisme. Sebab, dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terutama dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah diperlukan dukungan kesiapan aparatur negara yang mantap, sebagaimana dijelaskan *Baridwan* (2001), Pemerintah akhir-akhir ini memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yakni memebrikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat sesuai perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparat Desa sebagai unsur aparatur negara mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting didalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan masyarakat desa. Artinya, keberhasilan didalam

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan, dan kinerja dari aparat desa sebagai tanggung jawabnya.

Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi yang terus berkembang untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, dengan adanya dana desa yang tentunya membantu pertumbuhan ekonomi desa yang baik pula. Dengan adanya geliat pembangunan desa melalui program-program desa yang inovatif yang dirancang tersebut menginisiasi munculnya konsep model pembangunan desa berbasis *smart village*. Konsep *smart village* diadopsi dari konsep *smart city* yang terlebih dahulu diketahui di Indonesia. Istilah ini telah digunakan disebagian besar desa yang berada di Indonesia. Dasar program *Smart Village* adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Definisi *smart village* sesuai dengan pasal 78 dan UU Desa pasal 86

Pengembangan *smart village* tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memkasimalkna pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Konsep *smart village* merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dari perkembangan *smart city*. Unit pemerintahan terendah dalam struktur wilayah desa, yang juga memerlukan adanya suatu pembahuran terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (Aditama, 2018; Badri, 2016; Mayon 2016). Selanjutnya pada literatur yang berbeda dijelaskan bahwa *smart village* didefinisikan sebagai sebuah desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Brian Heap (2015) Memberikan penekanan adanya peningkatan kesadaran masyarakat desa akan hak-hak mereka dan

menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Hak-hak yang dimaksud disini sama dengan meliputi hak-hak dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Smart village diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa seperti yang didapatkan oleh masyarakat kota namun dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Sehingga tidak tercipta *gap* yang besar antara kehidupan masyarakat kota dan desa. Dengan adanya penerapan smart vilagge diharapkan adanya peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa secara merata dan berkesinambungan untuk melihat bagaimana kesiapan dari aparatur pemerintah desa.

Kesiapan aparatur pemerintah desa tentu saja dihadapkan oleh perubahan arah pelayanan yang makin modern yang berlandaskan pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka dan berkembang. Pelayanan yang maksimal tercermin dari sumber daya yang mumpuni untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan memelihara kualitas kerja aparat dapat di mulai dengan upaya motivasi di samping itu juga perlu adanya peranan kepemimpinan yang menjadi faktor pendukung dalam kualitas pelayanan aparat pemerintah desa.

Terkait dengan permasalahan kesiapan sumber daya aparatur pemerintah desa seawang menuju smart village nantinya akan terlihat bagaimana kesiapan dan tantangan yang akan di hadapi pemerintah desa seawang menuju smart village. Desa Sebang yang berada di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan waktu tempuh dari Kabupaten Tana Tidung memakan waktu 10-15 menit menuju ke desa Sebang, kecamatan sesayap yang berjarak 8-9

km dan memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Belum diketahui bagaimana kesiapan dan perkembangan desa seabawang baik itu dari masyarakatnya maupun dari pemerintah desa menuju smart village. Desa seabawang merupakan satu satunya Desa yang pada saat ini telah menerapkan pelayanan berbasis aplikasi Digides di Kabupaten Tana Tidung tentunya untuk menerapkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dibutuhkan kesiapan dari aparat pemerintah Desa Seabawang menuju smart village. Namun pada kenyataannya kualitas pelayanan, yang ingin diterapkan tidak sesuai karena dihadapkan dengan efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. selain itu juga pada saat ini permasalahan yang terjadi ialah tentu saja kurangnya sumber daya manusia dan tentunya tingkat pendidikan yang kurang, begitupun dengan pengetahuan yang kurang, koneksi jaringan yang kurang memadai, masyarakat yang masih acuh dan tidak mau tau. dalam hal ini seharusnya pemerintah desa harus memberikan sosialisai dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. pelayanan berbasis aplikasi tersebut yang masih bisa di katakan tidak tepat sasaran karena lingkungan masyarakat yang masih tidak peduli dan masih kurang paham dalam pelayanan ini. Dikarenakan juga masih kurangnya kemampuan dari aparat untuk mengajak masyarakat, begitupun dengan sikap masyarakat yang tidak mau tahu akan keberadaan atau ketidak inginan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam berpartisipasi (apatis) yang memicu kurangnya pelayanan dari pemerintah Desa Seabawang. Maka dari itu, perlu adanya kesiapan dari sumber daya aparat pemerintah desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa jika dihubungkan dengan kenyataan dilapangan tidak berjalan sesuai dengan kondisi idealnya. Aparatur pemerintah desa jika berkompeten dalam memberikan pelayanan tentu saja akan berdampak bagi masyarakat, dalam hal pelayanan yang dimana pada saat ini merupakan era digitalisasi yang segala bentuk informasi maupun pelayanan

administrasi semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan didukung dengan prasarana yang menunjang kinerja pemerintah desa, kemampuan yang telaten dalam berkerja dan memberikan pelayanan yang baik.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu dan memiliki kapasitas untuk menjalankan otoritas pemerintah (*governability*). dengan bersamaan munculnya konsep *governability* pada tahun 1975, berangsur-angsur munculnya teorisasi tentang kapasitas negara. Konsep *governability* ataupun *governabilitas* adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (*Samuel Huntington, 1975*) Konsep *governability* sendiri dapat dikatakan sebagai perluasan kapasitas kegiatan memerintah dan dimana disatu sisi lain pertumbuhan birokrasi, pengaturan, pelaksanaan, lembaga “keluaran” pemerintah sendiri lebih kepada kapasitas itu sendiri yang di mana tentu saja adanya penurunan otoritas memerintah dan meningkatkan fungsinya agar tentunya terlaksananya kapasitas otoritas pemerintah yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan perpektif *Governability* untuk melihat bagaimana kinerja dari kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari kesiapan sumber daya aparatur desa sebangung menuju smart village.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi faktor utama dalam penelitian ini : Bagaimana kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebangung dalam mengimplementasikan digitalisasi program menuju Smart Village

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan sumber daya aparatur desa sebangung dalam mengimplementasikan digitalisasi program dan pelayanan publik menuju smart village.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan sumber daya aparatur desa sebangung dalam pelaksanaan program smart village.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ini di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan yang dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dan memperkaya penelitian mengenai Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebangung Menuju Smart vilagge

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah. Hasil kajian ini bisa dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintahan desa baik ditingkat kabupaten/kota, sebagai bahan pedoman dalam Kesiapan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Menuju Smart Village
- b. Bagi Pemerintahan Desa. Hasil kajian ini bisa dijadikan rujukan untuk dapat melihat Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Menuju smart vilagge

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan Analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian juga dapat diartikan sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan oleh

seseorang peneliti. Dan di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut. :

1. Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebawang Menuju Smart Village sebagai berikut :
 - a. Faktor Komunikasi
 - b. Sumber daya
 1. Sumber daya manusia
 2. Anggaran
 3. Fasilitas
 4. Informasi dan kewenangan
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Pelaksanaan Program Smart Village Pemerintah Desa Sebawang

F. Litelatur Review

1. Dian Herdiana Tahun 2019. Sekolah tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi *Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di indonesia.tiga elemen pokok smart village, Yakni smart : goverment,community dan environment.* kelebihan, bisa memunculkan gambaran baru konsep mengenai elemen *smart village* kekurangan metode yang di gunakan kurang dijelaskan.
2. Tia Subekti & Ratnaningsih Damayanti Tahun 2019. Universitas Brawijaya *Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Boon pring sanankerto Turen Kabupaten Malang.* Penerapan *smart village* pada Desa Wisata Boon Pring menggunakan variabel smart city yaitu : *-smart people – smart government- smart economy-smart environmental-smart promotion.*Kelebihan,adanya hasil dari penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan variabel sehingga ada perbandingan. Kekurangan,

adanya hambatan dalam mewujudkan *smart village* yaitu minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintahan.

3. Ahmad Akbar & Dana Indra Sensuse Tahun 2018 Universitas AMIKOM Yogyakarta. *Pembangunan Model Eletronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa*. Konsep *e-government* diaplikasikan dengan membuat aplikasi-aplikasi berbasis elektronik seperti tata keuangan desa, pelayanan administrasi desa, dan pengelolaan dokumen. Kelebihan, Membangun model *e-Government* khususnya dalam hal layanan pemerintahan desa. Kekurangan, paparan hasil dan pembahasan terlalu singkat.
4. Rani Rachmawati Tahun 2018 Universitas Gadjah Mada. *Pengembangan Smart village untuk penguatan smart city dan smart Regency*. Variabel *smart city* yang cocok untuk di terapkan pada konsep *smart village*. -*smart Government-smart community-smart economy-smart enviromnent*. Kelebihan Pembaca dapat melihat perbedaan antara *smart city*, *smart regency* dan *smart village*. Kekurangan, Terdapat penjelasan tentang teori *Smart village* yang masih umum.
5. Komang Rinartha & Luh Gede Tahun 2019 STMIK STIKOM Bali. *Peningkatan Kemampuan Teknologi Sekeha Teruna Teruni Banjar pandean dalam Mempersiapkan Smart Village*. pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pengenalan internet sehat dalam rangka mendukung teruna teruni dalam menyikapi dampak internet yang sehat. Kelebihan, dengan pelaksanaan secara langsung membantu penerapan secara baik. Kekurangan, kurangnya waktu dalam pelaksanaan dan tidak banyaknya keterlibatan teruna teruni secara umum

6. Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo & Novie Indrwati Sagita Tahun 2020 Universitas Padjadjaran. *Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)*. Desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. *Desa, Smart Governance, Pelayanan prima*. Kelebihan, melalui aspek teoritis sudah memenuhi aktivitas pemerintah desa dan implementasinya. kekurangan, keterlibatan aspek yang belum menyeluruh.
7. Okta Karneli, Ruzikna, Kasmarudin & Frini Karina Andini Tahun 2019 Universitas Riau. *Sosialisasi dan implementasi program smart village di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singing*. Pembinaan dalam penggunaan internet cerdas dalam peningkatan ekonomi. *smart vilage, Desa, ekonomi, kesejaheteran, teknologi koununikasi dan informasi*. Kelebihan adanya implementasi secara langsung dalam pembinaan smart villgge itu sendiri. Kekurangan tidak ada penjelasan secara rinci terkait smart villge itu sendiri dan perlu adanya pembinaan secara berkala.
8. Welis Rarldianingrat & Fitra Tahun 2021 Universitas Lakidende Unaaha. *Kajian Model Desa Cerdas (Smart village) Berbasis satu Desa Satu Greenhouse Pada Wilayah Pusat Pertumbuhan desa di Kabupaten Konawe*. Menganalisis sistem kelembanggan desa dalam desain desa berbasis produksi. Kelebihan model kebijakan yang diterapkan mendukung kebijakan desa cerdas tapi lebih kepada pengembangan greenhouse, kekurangan lebih mengutamakan kebijakan greenhouse dari pada penjelasan smart village pada umumnya.
9. Ulya Rizqina Tahun 2021 Fakultas Tabiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. *Analisis Kesiapan Desa di Kecamatan Indrapuri Menuju Smart Village (Gampong Seureumo, Meunara*

dan Lampupok Raya) smart village, smart governance, smart community.

Kelebihan penerapan smart village yang terperinci. Kekurangan kesiapan dari masyarakat dalam penerapan smart village itu sendiri.

10. Sangaji Maulana, Dian Kagungan, Ita Prihantika Tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. *Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Kelebihan untuk implementasi smart village tepat sasaran dan jelas. Kekurangan masih kurang sasaran dan respon dari masyarakat umum.

Berdasarkan literatur review diatas yang menjelaskan tentang bagaimana menyiapkan, maupun kesiapan, dalam pelaksanaan menuju smart village. Dapat disimpulkan kurangnya kapasitas dari pemerintah desa yang tentunya mengakibatkan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat desa. tidak melihat bagaimana efektifitas pelayanan yang diberikan apakah sesuai ataupun tidak. Belum membahas bagaimana Kesiapan sumber daya aparatur pemerintah desa. Dan dalam penelitian ini melihat bagaimana kenyataan yang terjadi dilapangan baik itu penerapan smart village maupun implementasi program langsung kepada masyarakat.

Posisi dalam penelitian ini dari sudut pandang yang berbeda yakni menambah diskursus penelitian yang di harapkan mampu memiliki kapasitas untuk menjalankan otoritas pemerintah governability dan didalam penelitian ini memiliki lokasi yang baru berada di Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian dalam hal ini menempatkan pemerintah desa sebagai subjek, yang akan dianalisis adalah kesiapan dari aparatur pemerintah desa menuju smart village dan didekati menggunakan perspektif Governability dan untuk metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif.

G. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Implementasi pada dasarnya berasal dari pada kebijakan itu sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan penting. Karena implementasi merupakan kegiatan yang dari keseluruhan proses perencanaan awal kebijakan itu sendiri. Secara etimologi pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab yaitu. Konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64). Dan menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:65).

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya

pemahaman yang yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), Sedangkan menurut Horn dan meter. *“Those actions by public and private individual (or grup) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dan Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) menyatakan, implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:5) Studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Georage Edward (2011) dalam (Widodo (2011:96-110) melihat implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, dimana banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi itu sendiri. Adapun faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target grup*) sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar prose implementasi kebijakan berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*) kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait.

b. Sumber Daya

Sumber daya (*Resourc*) memiliki peranan penting dalam impementasi kebijakan, ini artikan bahwa, bagaiman pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat

2) Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran (*Budgetary*) berkaitan dengan kecukupan modal atau inovasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas

Fasilitas (*facilitiy*) atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikendaki.

c. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (*SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan pengertian implementasi maupun berhubungan dengan kebijakan dapat dikatakan implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan atau sekompok orang baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan keluaran dari kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya kepada kelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha perubahan besar dan kecil yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil dari kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

2. Pengertian Desa

Secara Etimologi Kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto (2010;6) Menyatakan Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinterkasi antara unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. *N.Daldjoeni* (2011;4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H.A.W. Widjaja (2009;4) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Paul H. Landis Memberikan definisi Desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha (Ekonomi) adalah agraris yang paling umum sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Sedangkan Pengertian Desa menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pemerintah Desa adalah suatu landasan pemikiran dalam pengatur mengenai pemerintah Desa dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa yang dimaksudkan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Dengan susunan pemerintah Desa yang ditambah dengan adanya BPD dimaksudkan agar meningkatkan sistem demokrasi dan mencegah adanya kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa. Dengan kata lain, pemerintah Desa merupakan lembaga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah yang bertugas menjalankan urusan Pemerintahan di Desa yang nanti akan berdampak dalam perkembangan pembangunan dan kepentingan nasional. (HAW Widjaja,1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta, Raja Grafindo Prasada, hlm.10.)

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki perenanan yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/kelurahan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi yang terendah langsung dibawah camat. dan harus diketahui Desa merupakan bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala Desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur oleh masing-masing indivdu sebagai perangkat Desa. Pemerintah desa mempunyai hak dalam mengatur

dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, dalam hal ini kewenangan Desa:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang di serahkan kepada Desa.

Menurut Sukriono (2008) Pemerintahan Desa adalah berupa kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kewenangan Desa meliputi yaitu kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, dan sebagai pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan praaksara masyarakat yang berdasarkan adat istiadat.

Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari Desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dalam pengangkatan serta pemberhentian seseorang bagian dari pemerintah desa adalah wewenang dari seseorang Kepala Desa, akan ada tetapi dalam melakukan

wewenangnya itu tentunya seorang Kepala Desa tetap harus dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang ataupun perlakuan yang berlaku.

Didalam UU No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang strategis untuk mengatur masyarakat demi mewujudkan pembangunan pemerintah. maka diterbitkan peraturan atau perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemerintah Desa yang mengatur pemerintah Desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa, yang meliputi sekretaris Desa, dan perangkat lainnya. adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa.

2. Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk dan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa).

3. Sekretaris

Merupakan perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa untuk mempersiapkan dan melakukan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan penyusunan laporan pemerintah desa

4. Pelaksana Teknis Desa

- a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertebitan masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.
- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa. Serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa.
- e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksana Kewilayahan

Kepala dusun (KADUS) adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. **Governability**

Kemunculan *governability* berangkat dari diskursus tentang krisis demokrasi yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, bersamaan dengan krisis-krisis kapitalisme karena beberapa hal seperti perak teluk yang berkepanjangan, harga minyak yang melambung tinggi, serta tuntutan kepada pemerintah semakin besar namun kapasitas pemerintah mengalami penurunan. *Governabilitas*, yang berkaitan dengan otoritas pemerintah, dipahami pada mulanya dengan posivitalitas Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang menghasilkan peningkatan substansi dalam aktivitas pemerintahan dan penurunan substansi dalam otoritas pemerintahan. Penurunan otoritas pemerintah menimbulkan keraguan tentang solvabilitas politik pemerintah. Dorongan demokrasi adalah membuat pemerintah menjadi kurang kuat dan lebih aktif untuk meningkatkan fungsinya dan menurunkan otoritasnya. Pemerintah dalam hal ini harus mampu dan memiliki kapasitas untuk menjalankan otoritas pemerintah (*governability*). Dengan bersamaan munculnya konsep *governability* pada tahun 1975, berangsur-angsur munculnya teorisasi tentang kapasitas negara.

Konsep *Governability* adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (*Samuel Huntington, 1975*) *governabilitas* (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Kekuasaan menjadi pintu masuk pembicaraan pemegang

kekuasaan bisa saja berhenti *rulling* atau mempertahankan kekuasaan, bisa juga menggunakan kekuasaan untuk *leading*, atau menggunakan otoritas secara rutin untuk menyelenggarakan negara (*ordering the state*) semata. Kekuasaan bisa membentuk *government making* ketika struktur-insitusi berkerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelebagaan *governabilitas*. Ini terlihat dari bagaimana fungsi-fungsi utama pemerintah melembagakan dalam legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh palemen-parlemen, sekaligus berkerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga dan masyarakat. Pelebagaan *governabilitas* melakukan kanalisasi hak dan kepentingan beragam subjek, sekaligus melakukan limitasi kekuasaan politik, sehingga mengarahkannya menjadi otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban (reponsibilitas) dan tanggungjawab (akuntabilitas).

Sutoro Eko menjelaskan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Sedangkan kooiman (1994) menganggap *governability* berkaitan dengan mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Menurut kooiman *governability* berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Meski demikian *governability* seringkali memunculkan ketidakpastian dalam entitas sosialnya. Konsepsi Kooiman tentang *governability* merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memerintah sekaligus menyatukan setiap kepentingan masyarakatnya sehingga mereka bergerak untuk berpartisipasi. Selain itu, respon dari pemerintah untuk setiap permasalahan kebijakan tidak harus selalu sama atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara harafiah, *governability* berarti kemampuan pemerintah dalam memerintah (*ability of goverment in governing*). Ada tiga perspektif yang biasa digunakan ataupun dipakai untuk memahami makna ini, yaitu: *Pertama*, persepektif yang memerintah (*governing*) terutama pemerintah. *Kedua*, perpektif yang diperintah

(*governed*). Menurut perspektif ini, negara adalah subjek yang diperintah oleh pemerintah. Perspektif ini berbicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi. *Ketiga*, perpektif interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*.

Governability mengandung lima dimensi, yaitu legitimasi, otoritas, aktivitas, kapastias, dan efektivitas memerintah yang dilakukan pemerintah. Otoritas, kapasitas dan efektivitas dalam membangun ekonomi dan mnejaga stabilitas hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat dan otonom. Dengan begitu, yang memerintah bukan pemerintahan melainkan negara, atau negaranisasi pemerintahan. konsep *governability* sendiri dapat dikatakan sebagai perluasan kapasitas kegiatan memerintah dan dimana disatu sisi lain pertumbuhan birokrasi, pengaturan, pelaksanaan, lembaga “keluaran” pemerintah sendiri lebih kepada kapasitas itu sendiri yang di mana tentu saja adanya penurunan otoritas memerintah dan meningkatkan fungsinya agar tentunya terlaksananya kapasitas otoritas pemerintah yang baik kepada masyarakat.

Governabilitas bersifat interaktif sehingga dibutuhkan *governance*. tetapi bukan *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun *good governance*. Dua makna ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”, dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan ekplansi terhadap praktek pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan “*bringing government back in*” untuk merespon kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen yang kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata

kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai.

Sutoro Eko menjelaskan bahwa *governabilitas konservatif* yang anti legitimasi, melihat ungovernability bukan semata dari sisi pemerintah yang kelebihan beban (*overloaded*), tetapi pihak diperintah (diutamakan masyarakat) yang tidak bisa diperintah (*ungovernatable*). Peraturan Pemerintahan bisa digunakan menyalurkan otoritas pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen bagi birokrasi dan teknokrat untuk menyerat pemerintah sekaligus untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Tantangan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi bagaimana melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan demokrasi ditingkat Desa. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam hal ini memiliki sejumlah indikator, *Pertama*, secara institusional seberapa jauh Pemerintah Desa mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, baik dalam menyelenggarakan perencanaan, melaksanakan pembangunan dan penguatan kompetensi administratif, SDM, kepemimpinan, dan pengelolaan anggaran. dan *kedua* secara komunitas, bagaimana Pemerintahan Desa mampu melakukan fungsi pembinaan ke masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mewujudkan pemerintahan Desa yang akomodatif, aspiratif, dan partisipatif.

5. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien

(Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Pengertian kapasitas menurut Freddy Rangkuti (2013;94) Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimal dari sebuah fasilitas. Sedangkan pendapat Sumyung Lalu (2003;99) Kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari sudut fasilitas. Sedangkan pengertian sumber daya manusia menurut Sonny Sumarsono (2003;6) Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu berkerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu berkerja berarti melakukan kegiatan yang mempunyai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Sedangkan menurut Ruki dalam Edi Sutrisno (2010;5) *Human Resource*, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan kualitas usaha atau proses kemampuan yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang, jasa, dan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

Kapasitas merupakan bagian penting didalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dalam pelaksanaan pendidikan baik itu formal maupun informal. Di dalam pemerintahan

pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan juga deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak akan ada namanya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya (Lukman Munawar Fauzi, 2016 : 63).

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10).” kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu” Selanjutnya Wardianto dalam Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah insitusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Dan menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), Kapasitas dapat di ukur melalui 3 indikator yaitu:

a. Pemahaman

Menurut Sudijono (2011:50) Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu di ketahui dan dingat. Sedangkan menurut Widiasworo (2017:81) bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan dan

mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi “satu gambar yang utuh di otak kita. bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya. dan dapat dikatakan penelitian guna menterjemahkan pemahaman sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang individu dalam menginterpretasi atau mengulang informasi yang telah ditemukan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

b. Keterampilan

Keterampilan biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang yang bervariasi. Keterampilan (*Skill*) merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat (Sri Widiastuti,2010:49). Sedangkan menurut Hari Amirullah (2003:17) istilah terampil juga di artikan sebagai sesuatu perbuatan atau tugas, dan sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran. Sedangkan menurut Singer dikutip oleh Amung (2000:61), Keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efektif. dan dapat dikatakan keterampilan merupakan sebagai kecakapan seseorang yang memiliki skill yang tentunya dapat memudahkan pekerjaan dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisiensi tanpa adanya masalah sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik pula.

c. Kemampuan

Kemampuan (*Abilities*) ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang diperoleh sejak lahir, belajar dan dari pengalaman (Soehardi,2003:24).Sedangkan menurut

Stepen P.Robbins (2003:52) Kemampuan adalah sesuatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu. bisa dikatakan kemampuan sebagai kecakapan atau potensi mengatasi sesuatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan hasil dari latihan ataupun praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson 2006) senada dengan itu pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang telah dikelola pemerintah agar tetap diketahui pegawai dan masyarakat meskipun di era global yang semakin pesat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki agar dapat mengembangkan keterampilan manajemen, skill pelayanan dan kebijakan esensial yang sangat dibutuhkan dan juga dapat membangun struktur budaya, sosial politik, dan ekonomi negara. Sumber daya manusia sangat penting karena memiliki proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia ilmu untuk mengatur hubungan dan peran secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini kapasitas sumber daya manusia dapat dikatakan suatu proses yang dimana meningkatkan kemampuan seseorang dan kemampuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi ataupun suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan pekerjaan.

6. Smart Village

Smart Vilagge Adalah suatu konsep Desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *Smart city* namun dengan segala yang lebih kecil (wilayah Desa atau Kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep *Smart Vilagge* (Desa pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Konsep desa cerdas atau *smart village* merupakan suatu program yang berawal dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengharuskan menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan dengan memanfaatkan anggaran desa dan melihat dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka akhirnya tercetusnya suatu program kebijakan yang bernama program *smart village* ini. Program ini suatu inovasi pemerintah dalam memanfaatkan suatu teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparansi, akuntabel dan lebih efektif serta efisien. Penerapan *Smart Vilagge* merupakan suatu alternatif solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik yang ada di desa selama ini demi mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. permasalahan klasik yang selama ini terjadi di desa semakin lama semakin kompleks dan berkepanjangan sehingga dibutuhkan alternatif solusi terlebih kini zaman semakin modern ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan bahkan di dunia sudah banyak *meng-upgrade* cara dan proses tradisional dalam pola pikir, berinteraksi, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa.

Menurut Hasan (2021) *smart village* merupakan suatu Desa yang secara inovatif menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam penerapannya tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga dapat mengembangkan potensi desa dalam berbagai bidang, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis teknologi dan informasi. Sedangkan menurut Herdiana (2019) menjelaskan bahwa konsep *smart village* merupakan konsep desa yang cerdas yang tidak hanya mampu menerapkan penggunaan teknologi, tetapi mampu mengembangkan potensi desa, meningkatkan ekonomi dan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang berkualitas berbasis informasi. Sedangkan menurut Viswanadhan (2010). Konsep *Smart vilagge* mengacu pada perangkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat desa dan pelaku usaha secara efektif dan efisien dengan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: insitusi, sumber daya, rantai pelayanan, dan teknologi dan mekanisme penyampaian layanan. Lebih lanjut pendefinisian *Smart Village* (Desa Cerdas) menurut santoso dkk (2019:15) terdapat salah satu aspek dalam *Smart Village* yaitu *Smart governance* yang menyangkut pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi. Ada empat aspek penting dalam berhasilnya penerapan Smart Village sebagai berikut :

a. Smart government

Smart government merupakan pemerintahn yang cerdas, terbuka partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan *e-government* yakni pemerintahan yang memanfaatkan teknologi komunikasi

dalam pengelolaan pemerintahannya Herdian (2019). *Smart government* identik dengan adanya penerapan *E-Government* atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya. *Smart government* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi dan diwujudkan kedalam 4 fungsi pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Khushanandjani, 2015)

b. Smart Community

Smart Community merupakan masyarakat yang cerdas dalam artian dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. *Smart Community* merupakan kontribusi masyarakat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (Herdiana, 2019). *Smart Community* atau masyarakat merupakan figur utama dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan desa, bukan sekedar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat desa harus berperan aktif dalam proses pembangunan desa agar dapat merasakan manfaat dari suatu program pemerintahan. Masyarakat perlu menjadikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai peluang untuk mengoptimalkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan desa.

c. Smart Environment

Smart environment adalah merupakan suatu pemanfaatan dan cara mengatasi suatu keadaan sosial dan lingkungan yang berbasis teknologi

informasi Herdiana (2019). *Smart environment* merupakan kegiatan pemanfaatan lingkungan alam dan sosial agar dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai dengan menggunakan teknologi informasi (Hasan, 2021). Kawasan pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya tersendiri yang berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Dalam konsep *smart village* suatu lingkungan bukan hanya berorientasi pada lingkungan tetapi juga mencakup semua unsur menjadi ciri khas desa. yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial di lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan tatanan alam tersusun atas pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya seperti dalam hal pendataan, dokumentasi dan pengidentifikasian potensi alam secara proposional tanpa merusak tatanan alam.

d. Smart economy

Smart economy merupakan suatu konsep pengembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor unggulan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan budaya yang berbasis pada sumber daya lokal. *Smart economy* ditandai dengan semakin tingginya persaingan dan munculnya inovasi-inovasi baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Giffinger and Haindl 2007). Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat dicapai dengan penguasaan teknologi informasi

dan juga teknologi internet sehingga akan lebih *simpel* (lebih muda), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis deskriptif dengan pendekatan kualitatif penulisan deskriptif Menurut Sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Unit Analisis

Menurut Morrison (2017:166) Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis, unit analisis ini biasanya juga disebut sebagai unit observasi sedangkan untuk unit pengamatan merupakan suatu satuan-satuan yang menjadi sumber data yang dihimpun. Berdsarkan uraian tersebut dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat.

Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Dengan demikian narasumbernya adalah :

a. Pemerintah Desa

Dalam hal ini adalah kepala Desa yang memimpin dan menjalankan pemerintahan desa

b. Perangkat Desa

Dalam hal ini perangkat desa yang berkerja di pemerintahah desa sebang

c. Masyarkat

Dalam hal ini adalah toko masyarakat yang berada diwilayah dan bertempat tinggal di desa sebang

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kesiapan sumber daya aparatur desa Sebang.

c. Subyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016;300) Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitan kulitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitan ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teklinik pengambilan sampel sumber data dengan perimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Dengan informan ataupun Subyek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa, dan masyarakat adapun informan yang akan diwawancarai sebanyak 10 orang.

Lebih lanjut subyek penelitian dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1
Deskripsi informan/Deskripsi subyek penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/ Pekerjaan
1	Damianus	Laki-laki	Kepala Desa
2	Sonlyanus	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Mario	Laki-laki	Kasi Pelayanan
4	Marelenus Hengki	Laki-laki	Kasi Pemerintahan
5	Zakaria	Laki-laki	Kasi Tu dan Umum
6	Yayu Supriani	Perempuan	Staf PPKD
7	Markus yuteng	Laki-laki	Masyarakat Desa Sebang
8	Valentina	Perempuan	Masyarakat Desa Sebang
9	Samuel	Laki-laki	Masyarakat Desa Sebang
10	Petrus Paulus	Laki-laki	Ketua BPD

Sumber : Penulis Tahun 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui :

a. Observasi

Menurut Sugiyono, (2016:145) Observasi adalah merupakan teknik pengelolaan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Dalam observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang mengenai Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebawang Menuju Smart Village Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2016:231) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan dengan wawancara tanya jawab langsung dengan infroment yang dilakukan guna mengatahui Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebawang Menuju Smart Village. Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimanta Utara.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk

karya misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif kualitatif. misalnya aturan ataupun kebijakan maupun berbentuk gambar misalnya foto.dokumen berbentuk berupa profil desa maupun pemerintahan desa serta dokumen pelengkap lainnya yang berhubungan dengan Kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebawang menuju Smart Village Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis menurut Huberman dan Miles dalam Suyitno (2018:129-131), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (Data Colletion)

Pengumpulan dilakukan setelah penarikan kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diperoleh proposisi-proposisi pernyataan atau resume sebagai temuan penelitian yang dapat berlaku secara umum.

b. Reduksi Data (Data Reducation)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir data di ambil.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Bentuk Penyajian data kualitatif berupa teks naratif (Berbentuk catatan lapangan), Matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencari keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu cara berfikir dimulai analisis sebagai data yang akan dihimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan (Suyitno,2018:129-131).

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sebang

Pada jaman penjajahan Belanda pada jaman itu sering terjadinya perang antar suku, maka waktu pada waktu itu nenek moyang, yang bernama Aki Polod Pangeran Tuwo. Aki Polod Pangeran Tuwo menyelamatkan diri beserta anggota dan rakyatnya, lalu mereka tinggal di gunung ruka hulu sungai Sebang, sejarah asal-usul Desa Sebang yang pada saat berpindah-pindah tempat tinggal. (rumah adat dayak bulusu) yaitu :

1. Rumah Adat di gunung Ruka
2. Rumah Adat sungai Lancat Nyatun
3. Rumah Adat Tunon Gasah
4. Rumah Adat Baloi Piasau Melutok
5. Rumah Adat Ranca Payang
6. Rumah Adat Baloi Peluon
7. Rumah Adat Baloi Penjait
8. Rumah Adat Batang Tagas
9. Rumah Adat Baloi Senorob
10. Rumah Adat Sungai Tampa
11. Rumah Adat Sungai Lampun Liagu Tebarau

Ini lah catatan kepindahan nenek moyang dari muruk Ruka (Gunung Ruka) di sebelas tempat, Rumah Adat yang terakhir tempat tinggal sekarang di Desa Sebang. Dan dibawah ini terdapat nama-nama nenek moyang asli keturunan dayak bulusu yang menguasai seluruh wilayah Desa Sebang yaitu :

1. Aki Tugun
2. Aki Polod Pangeran Tuwo
3. Aki Pilo Panglima
4. Aki Isak Kapitan Tuwo
5. Aki Usad Kapitan Muda
6. Aki Olod Panglima Muda
7. Aki Umbol Maspatih

8. Aki Anud Awang
9. Aki Isun Semeriyot

Pada Mulanya Desa Sebangung merupakan Desa yang cukup Tua sejajar dengan desa sesayap, sedulun, seputuk dan Rian. Keberadaan desa sebangung sejak Tahun 1100 sebelum masehi dimana kepemimpinan pada saat itu bernama Aki Polod dan berdomisili di Muruk Ruka bersama dengan Iparnya Aki Awub di muruk managil. Selang beberapa lama berjalan Aki polod lanjut usia sehingga diganti kepemimpinan beliau oleh anaknya sendiri yaitu aki Pilo, kepemimpinan aki pilo berjalan berapa puluh Tahun seiring berjalan usia yang semakin tua maka kepemimpinan beliau diganti oleh anaknya yang bernama aki usat. Dari kepemimpinan aki usat melahirkan pemimpin baru yang menggantikan kedudukan aki usat yaitu Aki Umbol kemudian kepemimpinan aki umbol digantikan oleh anaknya sendiri yaitu aki Anud. Kepemimpinan aki anud berjalan cukup lama kurang lebih 62 tahun dan beliau merupakan orang cukup terkenal diwiyah utara pada saat itu dan termasuk sakti dalam beberapa hal. Karena aki anud sudah lanjut usia dan beliau meninggal pada saat berumur 120 tahun. Kemudian dari kepemimpinan Aki Anud digantikan oleh anaknya yang bernama Aki Isun, Aki isun memimpin desa sebangung tidak cukup lama dan beliau memiliki anak dari istri pertamanya bernama Sayang sebanyak 5 orang, dan dari istri kedua bernama yamur beliau dikaruniai 2 orang anak. Seiring dengan berjalannya waktu kepemimpinan Aki isun digantikan oleh pak Yatan yang pada saat itu sebagai sekretaris beliau. Dan pak Yatan merupakan anak menantu dari Aki isun. Pada saat kepemimpinan pak yatan inilah awal mula lenyapnya nama desa sebangung di karenakan beliau sering meninggalkan kampung sebangung berladang di sungai sebidai dan akhirnya menetap disana yang kemudian mendirikan kantor desa Sebangung di sebidai. Dan karena pada waktu itu tidak semua keluarga ikut berladang kesebidai desa sebangung masih tinggal anak-anak dari Aki isun. Seiring berjalannya waktu anak-anak dari pak isun masing-masing menikah dan melahirkan anak-anak yang cukup banyak yang kemudian melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicit sehingga pada tahun 2005 desa sebangung kembali dimekarkan.

Desa Sebangung merupakan hasil pemekaran dari Desa Sebidai pada Tahun 2005 dengan dipimpin oleh Bapak Fransiskus Tonbessi Sebagai PJS. Kepala Desa (pejabat sementara) dengan masa Jabatan dari Tahun 2005 s.d Tahun 2006. Pada

Tahun 2007 dilanjut oleh Bapak Ramsyah Yorom I sebelum Pemilihan Kepala Desa Defenitif maka pada pertengahan tahun 2007 terpilihlah Bapak Jamhari sebagai Kepala Desa Defenitif dan sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Sebwang dengan masa jabatan dari Tahun 2007 s.d Tahun 2014. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nama-nama Kepala Desa Sebwang yang pernah menjabat hingga sekarang

No	Periode, Tahun	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2005– 2006	Fransiskus Tonbessi	PJS.Kepala Desa
2	2007	Ramsyah	PJS.Kepala Desa
3	2007– 2014	Jamhari.I	Kepala Desa Defenitif
4	2014– Bulan Juli Tahun 2018	Markus Yuteng, ST	Kepala Desa Defenitif
5	Bulan Juli s.d Desember Tahun 2018	Tehol	PLT. Kepala Desa
6	2019	Sri Winarni, ST	PJ. Kepala Desa
7	2020	Budiaji	PJ. Kepala Desa
8	2021-2027	Damianus	Kepala Desa Defenitif

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebwang-tanatidung Tahun 2023

B. Kondisi Desa Sebawang

1. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Sebawang Kecamatan Sesayap terletak di tengah-tengah 3 Kecamatan terdekat yaitu sebelah selatan Kecamatan Betayau, sebelah timur kecamatan Sesayap hilir, sebelah barat Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan jarak membentang kurang lebih 12 km. Dari ibu kota Kabupaten dengan luas wilayah 2852.09 ha.

Desa Sebawang meliki ketinggian berkisar 60 meter di atas permukaan air laut (DPL) Secara Administrasi Batas wilayah Desa Sebawang sesuai dengan peraturan Desa atau dasar kesepakatan antar Desa tentang penetapan batas Desa yang terbentuk empat buah pilar yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

-Sebelah Utara	: Sungai Sesayap
-Sebelah Selatan	: Desa Bebakung Kec. Betayau
-Sebelah Timur	: Desa Sepala Induk Kec. Sesayap ilir
-Sebelah Barat	: Desa Sebidai Kec. Sesayap

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

2. Iklim

Iklim merupakan keadaan rata – rata cuaca pada suatu wilayah. Komponen pembentukan iklim terdiri dari curah hujan dan temperature. Seperti kondisi di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya, Desa Sebawang memiliki iklim yang berbeda dengan iklim yang ada di Jawa. Iklim yang ada di Desa Sebawang merupakan hutan teropis yang cuacanya kadang berubah – ubah. Desa Sebawang memiliki suhu rata – rata harian 34°C. pada malam hari 25°C – 23°C sedangkan pada siang hari 32°C – 31°C dan curah hujan rata – rata 314.637 mm.

C. Kondisi Demografi Desa Sebang

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sebang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Demografi Penduduk Desa Sebang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	193	54,8
2	Perempuan	159	45,1
	Total	352	100

Sumber : *Profil Digitaldesa.id/sebang-tanatidung Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Sebang yang berjenis kelamin Laki-Laki adalah 193 orang dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin perempuan 159 orang. Dari jumlah penduduk Desa Sebang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi yaitu 54,8 % lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu 45,1 %

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Sebang berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel.

Tabel 2.4
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Tidak/Belum Sekolah	99	28,1
2	Belum Tamat SD/Sederajat	61	17,3
3	Tamat SD/Sederajat	68	19,3

4	SLTP/Sederajat	39	11,0
5	SLTA/Sederajat	60	17,0
6	Diploma IV/Strata I	19	5,3
7	Diploma III/Sarjana Muda	5	1,4
8	Diploma I/II	1	0,3
	Total	352	100

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Dari tabel 2.4 di atas menunjukkan dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Sebawang mulai dari jumlah penduduk yang tidak sekolah sampai dengan sarjana. Dapat dilihat penduduk paling banyak adalah tingkat SD 68 jiwa atau 19,3% sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah diploma III/sarjana muda dan juga diploma I/II yakni 5 dan 1 jiwa dari keseluruhan masyarakat desa sebawang dapat disimpulkan bahwa 352 jiwa yang mengenyam pendidikan yang mengenyam pendidikan dari tingkat SD sampai dengan sarjana SMP 68-39 atau 19,3% - 11,0 Berbeda jika dibandingkan dengan penduduk yang berpendidikan diploma IV dan I hanya 5,3% - 0,3%

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan tingkat Perkerjaan

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkerjaan

No	Jenis Perkerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Belum/Tidak Berkerja	105	29,8
2	Pelajar/Mahasiswa	78	22,1
3	Mengurus Rumah Tangga	65	18,4
4	Petani/Pekebun	28	7,9
5	Wiraswata	23	6,5

6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	4,2
7	Karyawan Swasta	12	3,4
8	Karyawan Honorer	5	1,4
9	Perangkat Desa	9	2,5
10	Buruh harian lepas	4	1,1
11	Tukang kayu	2	0,5
12	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1	0,2
13	Nelayan/Perikanan	1	0,2
14	Kontruksi	1	0,2
15	Sopir	1	0,2
16	Pendeta	1	0,2
	Total	352	100

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas menunjukkan tingkat perkerjaan masyarakat desa sebawang kurang lebih 16 (enambelas) dan jenis perkerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa sebawang bermayoritas perkerjaan sebagai petani dan perkerjaan lainnya yaitu 18,7% -7,9% Sedangkan yang menjadi PNS dan Aggota DPRD yaitu sebesar 4,2 % - 0,2 %

4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok Usia

Tabel 2.6
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase %
1	0-4	18	5,1
2	5-9	50	14,2

3	10-14	41	11,6
4	15-19	34	9,6
5	20-24	33	9,3
6	25-29	25	7,1
7	30-34	30	8,5
8	35-39	40	11,3
9	40-44	25	7,1
10	45-49	19	5,3
11	50-54	15	4,2
12	55-59	9	2,5
13	60-64	6	1,7
14	65-69	2	0,5
15	70-74	2	0,5
16	75-79	1	0,2
17	80-84	1	0,2
18	85+	1	0,2
	Total	352	100

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas menunjukkan masyarakat desa sebawang bahwa jumlah penduduk desa Sebawang yang paling banyak adalah yang berusia mulai beranjak dewasa yaitu 5-9 dan juga 35-39 Tahun 14,2 % - 11,3 sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 40-44 tahun sampai dengan 55-59 tahun yaitu 7,1 % - 2,9

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1	Islam	154	43,7
2	Katolik	145	41,1
3	Kristen	50	14,2
4	Buddha	3	0,8
	Total	352	100

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sebawang memiliki berbagai macam agama yaitu itu islam, katolik, kristen juga buddha dimana didominasi oleh islam dan katolik yaitu 43,7 % - 41,1 %

6. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 2.8
Jumlah Kepala Keluarga

No	Nama RT	Jumlah KK	Persentase%
1	RT.01	39	40,2
2	RT.02	24	24,7
3	RT.03	34	35,0
	Total	97	100

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan jumlah penduduk yang berada di RT.01 lebih banyak yaitu 40,2% dibandingkan dengan jumlah Penduduk keluarga yang berada di RT.02 dan RT.03 berkisar 24,7% - 35,0% dimana jumlah Kepala keluarga cenderung lebih sedikit.

D. Keadaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Penduduk Desa Sebawang memiliki berbagai macam-macam pekerjaan dan mata pencaharian yang terdiri dari PNS, petani, wiraswasta, karyawan swasta, perangkat Desa, karyawan honorer dan juga masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Secara spesifik dapat dilihat pada tabel 2.3.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan erat dengan lingkungan masyarakat maupun implikasinya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Sebawang secara umum didominasi oleh petani. Karena pertanian dan perkebunan merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian besar masyarakat Desa Sebawang. Adapun sumber daya alam yang ada sebagai berikut. :

1. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian, adapun pertanian yang dilakukan masyarakat Desa sebawang ialah bercocok tanam seperti, persawahan, padi gunung maupun jenis tanaman sayuran sebagainya.

2. Lahan Perkebunan

Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan, yang dimana segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dimana perkebunan yang ada di Desa Sebawang masih dalam kategori perkebunan pribadi atau perorangan yaitu perkebunan kelapa sawit.

3. Lahan Permukiman

Lahan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian tempat kegiatan yang dimana juga merupakan menjadi tempat hidupnya perekonomian masyarakat seperti adanya usaha toko, warung, kios dan lain sebagainya. Ada pula terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan kawasan permukiman

4. Hutan Desa

Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa. Yang mana di Desa Sebangung terdapat hutan Desa yang dimiliki oleh Desa Sebangung yang dapat dikatakan terjaga dengan baik.

5. Lahan Pekarangan

Lahan Pekarangan merupakan tanah yang terbuka berada di sekitaran rumah baik itu didepan rumah maupun belakangan rumah. Lahan pekarangan di Desa Sebangung biasa digunakan untuk menanam pohon, tanaman bunga, dan juga tanaman musiman dalam hal ini seperti cabe, serai, tomat maupun tanaman lainnya.

E. Pemerintah Desa Sebangung

1. Visi Dan Misi Desa Sebangung

1) Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proses yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Adapun Visi Desa Sebawang “ Terwujudnya Masyarakat Sehat Dan Produktif Melalui Pembangunan Berkelanjutan.” Melalui dengan adanya visi ini mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Sebawang dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasikan pembangunan Desa secara terarah dan terpadu.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi Pemerintah Desa Sebawang adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri
- b. Membangun SDM Desa yang profesional
- c. Memperkuat upaya kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga
- d. Memantapkan tatakelola pemerintahan Desa yang inovatif.

2. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi dalam suatu instansi pemerintahan ada guna menunjukkan tugas dan wewenang para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Maka dengan dari itu dengan adanya struktur oraganisasi dapat mengentahui hirearki pada suatu intstansi pemerintahan khususnya dalam hal ini Pemerintah Desa Sebawang. Adapun susunan dari struktur organisasi sebagai berikut :

Susunan

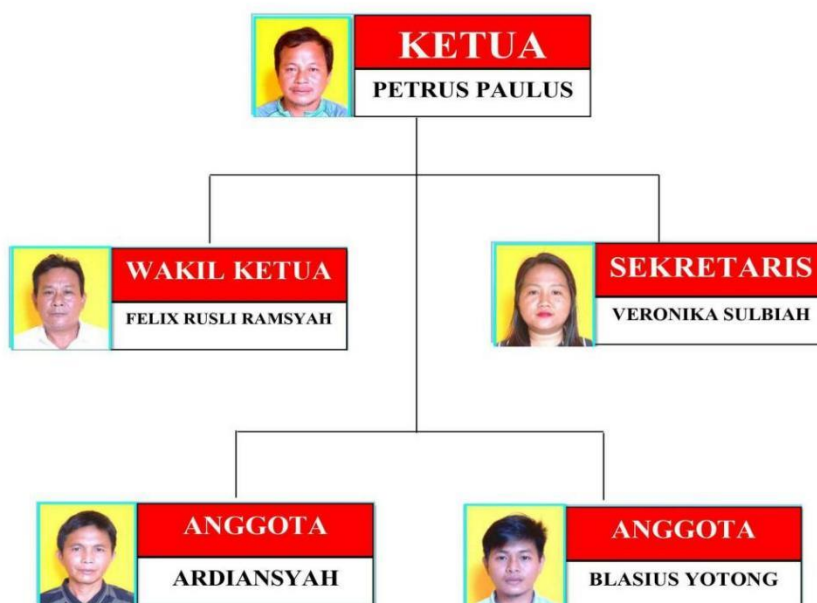
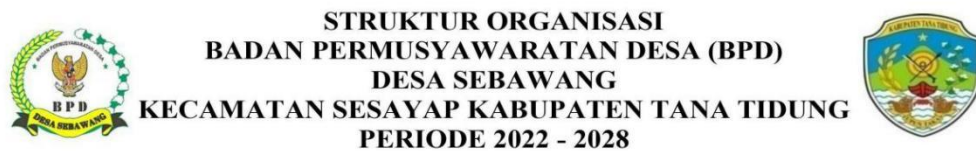
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sebawang



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sebawang

Sumber : Profil [Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung](https://digitaldesa.id/sebawang-tanatidung) Tahun 2023

Susunan
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sebawang



Gambar 2 Struktur Organisasi BPD Desa Sebawang

Sumber : Profil Digitaldesa.id/sebawang-tanatidung Tahun 2023

Berdasarkan gambar satu dan dua diatas menunjukkan adanya Susunan struktur organisasi Pemerintah Desa dan juga struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Sebawang susunan struktur pemerintahan ini merupakan gambaran susunan organisasi Pemerintahan Desa Sebawang yang menjalankan roda pemerintah Desa Sebawang.

DATA PERANGKAT DESA SEBAWANG TA.2023

No	Nama	Jabatan	Instansi	Alamat	Tempat tanggal lahir
1	Damianus	Kepala Desa	Kantor Desa Sebawang	RT.003 Desa Sebawang	Sesayap, 04 September 1984
2	Sonlyanus	Sekretaris Desa	Kantor Desa Sebawang	RT.001 Desa Sebawang	Lubak Manis, 22 Oktober 1986
3	Zakaria	Kaur umum	Kantor Desa Sebawang	Jln.Jumbun RT.02 Desa Sebawang	Tarakan, 15 September 1985
4	Agus Hendri	Kaur keuangan	Kantor Desa Sebawang	Jln.KKN Sebawang RT.03 Desa Sebawang	Pimping, 15 Agustus 1987
5	Julius robansyah	Kaur Perencanaan	Kantor Desa Sebawang	Jln.KKN Sebawang RT.03 Desa Sebawang	Sebawang, 10 Juli 1993
6	Dandi	Kaur Kesejahteraan	Kantor Desa Sebawang	RT.03 Desa Sebawang	Sebawang, 20 Maret 2000
7	Marcelenus	Kasi	Kantor Desa	RT.01 Desa	Sebawang, 25 April

	hengki	Pemerintahan	Sebawang	Sebawang	1990
8	Mario	Kasi Pelayanan	Kantor Desa Sebawang	RT.02 Desa Sebawang	Sebawang, 25 April 1993
9	Yayu supriani	Staf PPKD	Kantor Desa Sebawang	Jln.Sei.Sebawang RT.02 Sebawang	Tarakan, 08 Juni 1998
Total					

Sumber : RPJMDesa Sebawang Periode 2021-2026

F. Fasilitas Pendukung Smart Village di Desa Sebawang

Sarana dan prasarana

1. Alat anjungan Desa Sebawang

Alat anjungan Desa Sebawang merupakan alat teknologi informasi elektronik yang tentunya menjadi modal dasar penerapan smart village dalam hal pelayanan berbasis digitalisasi yang saat ini dimiliki Desa Sebawang ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan tentunya.

2. Alat absensi pemerintah sebawang dan buku tamu sebawang

Dengan adanya alat absensi ini tentunya meningkatkan kesadaran disiplin pemerinah desa sebawang maupun tamu yang datang tentunya akan meningkatkan efektivitas perkerjaan bagi pemerintah desa sebawang dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mengerti tentang adanya pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan dalam mengurus berbagai macam keperluan yang ingin diurus tentunya lebih efektif dan juga cepat

3. Alat komputer dan laptop

Komputer dan laptop merupakan perangkat ataupun alat komputisasi yang berfungsi dan berguna untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di desa sebang yang tentunya sangat diperlukan dan membantu dalam menjalankan pekerjaan seperti pekerjaan administrasi di desa sebang dan sebagainya.

4. Tower jaringan

Merupakan salah satu bentuk alat infrastruktur telekomunikasi yang ada di desa sebang adapun kegunaannya yaitu berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS ataupun tower jaringan adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti berhubungan dengan komputer maupun telepon seluler ataupun sejenis gadget lainnya.

5.. Wifi

Merupakan suatu teknologi jaringan nirkabel dengan memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sehingga dapat berkomunikasi atau bertukar informasi satu sama lain. Tentu saja hal ini memudahkan pemerintah desa memberikan informasi diwebsite desa sebang dan juga memebrikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti Whatssap dan juga media lainnya.

6. Papan informasi

Merupakan media yang lebih banyak digunakan oleh pemerintah desa sebang karena bisanya lebih diperhatikan oleh masyarakat desa dengan adanya papan informasi tentu saja dapat memberikan informasi terkait informasi yang ada di desa berupa anggaran dana desa, pembangunan desa dan lain sebagainya.

Tabel 2.8
Fasilitas Pendukung Smart Village

No	Fasilitas Pendukung	Jumlah
1	Alat anjungan Desa Sebang	1
2	Alat Absensi Pemerintah Desa	1
3	Tower Telekomunikasi/Jaringan	2
4	Komputer dan Laptop	12
5	Wifi	2
6	Papan Informasi	1

Sumber : RPJMDesa Sebang Periode 2021-2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebangung menuju Smart Village sudah berjalan dengan baik walaupun belum secara maksimal.

1. pemerintah Desa Sebangung sudah melakukan kesiapan sumber daya aparatur Desa dalam Mengimplementasikan Program digitalisasi sudah cukup baik dengan pemanfaatan teknologi informasi kedalam pemerintahan seperti pelayanan online maupun online melalui alat anjungan smart village desa sebangung dan juga pemanfaatan media yang ada seperti website desa sebagai tempat pengembangan potensi desa dan begitupun dengan pelayanan yang diberikan dan mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi memanfaatkan teknologi informasi ataupun elektronik yang ada.
2. pelaksanaan program memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. pemerintah Desa Sebangung sudah melaksanakan dan berproses dalam melakukan pemerintahan yang cerdas dengan membuat program-program kegiatan dan memanfaatkan teknologi informasi guna menyelesaikan permasalahan dasar di Desa Sebangung seperti adanya Website desa sebagai pelayanan elektronik dan dengan tentunya fasilitas penunjang internet gratis yang mendukung. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan, dan keterbukaan informasi terhadap publik.
3. Faktor pendukung pertama yaitu adanya komitmen pelaksanaan program pemerintah desa sebangung dengan masyarakat dan komunikasi antar pelaksana mulai dari kesiapan pemerintah desa sebangung sendiri maupun masyarakat

dukungan dan bantuan dari pemerintah atau instansi terkait lain juga merupakan faktor pendukung dan juga didukung dengan kegiatan sosialisasi-sosialisasi dengan program pelaksanaan smart village. Kedua tentu saja adanya keterlibatan masyarakat merupakan faktor pendukung ditambah dengan kesadaran masyarakat yang mulai melek digitalisasi seperti halnya menggunakan telepon android walaupun belum semuanya dan juga adanya alat pendukung seperti alat anjungan desa, website desa, jaringan telekomunikasi, komputer, laptop dan wifi dengan yang mendukung jaringan internet untuk mengakses segala sesuatu yang diperlukan. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program smart village, Faktor pertama terbatasnya kemampuan dan keterampilan dari aparatur pemerintah desa sebangung sendiri dan juga pelayanan berbasis online masih berjalan dalam tahap pengembangan dimana hanya satu admin yang menjalankannya karena keterbatasan sumber daya dari aparatur desa sebangung. Dan kadang kala masih lebih banyak pelayanan dalam bentuk offline karena membutuhkan jaringan internet yang mumpuni. Faktor kedua yaitu dari faktor masyarakatnya yang masih kurang mengerti dan ketidak pahaman masyarakat tentang pelayanan berbasis digitalisasi ataupun online adapula masyarakat yang memang tidak peduli dan acuh terhadap pelayanan berbasis elektronik tentu saja ini menjadi tugas penting bagi pemerintah desa sebangung untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi yang harus terus dilakukan agar kesiapan dari pemerintah desa dan pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik bisa berjalan lebih optimal.

B. Saran

Dalam kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebangun menuju Smart Village, khususnya kesiapan sumber daya aparatur Sebangun dalam mengimplementasikan digitalisasi program dan pelayanan publik dan bagaimana program peningkatan kualitas penggunaan digital bagi aparatur di Desa Sebangun. Ada saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sebangun perlu melakukan peningkatan kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebangun dalam mengimplementasikan digitalisasi program dan sosialisasi lebih lanjut mengenai Smart Village yang bersifat merata dan berkelanjutan agar kesiapan sumber daya aparatur Desa Sebangun dapat berkerja dengan kemampuan terbaik dan juga terampil.
2. Pemerintah Desa Sebangun harus meningkatkan program kualitas penggunaan digital bagi aparatur Desa Sebangun seperti mengadakan pelatihan rutin beberapa bulan sekali untuk penggunaan digitalisasi bagi aparatur pemerintah Desa Sebangun.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Sebangun dapat memberikan perhatian akan penambahan Staf Operator/ Admin staf pelayanan untuk pelayanan digitalisasi agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Sebangun dapat berjalan secara optimal.
4. Pemerintah Desa Sebangun harus selalu memberikan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang pelaksanaan program Smart Village agar berjalan dengan baik seperti peningkatan sinyal jaringan internet agar pelaksanaan program Smart Village dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, Novie Indraswari Sagita 2020.

Pengembangan Desa Berbasis Smart Village: Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagsari Kabupaten Karawang. Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Jurnal Moderat volume 6.

Nurjayadi, Torkis Nasution, Khusaeri Andesa 2020.

Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Melalui Implementasi Smart Village Pada Desa Rimba Makmur. STMIK Amik Riau. Jurnal volume.4

Ulya Rizqona. 2021

Analisis Kesiapan Desa Di kecamatan Indrapuri Menuju Smart village. Gampong Seureumo, Meunara, dan Lampupok Raya. Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam, Aceh.

Sangaji Maulana, Dian Kagungan, Ita Prihantika 2022.

Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Fisip Universitas Lampung. Jurnal volume.4

Dian Herdiana 2019.

Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di indonesia. Sekolah tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi

Tia Subekti & Ratnaningsih Damayanti 2019.

Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Boon pring sanankerto Turen Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya.

Ahmad Akbar & Dana Indra Sensuse 2018.

Pembangunan Model Eletronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa. Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Komang Rinartha & Luh Gede 2019.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Sekeha Teruna Teruni Banjar pandean dalam Mempersiapkan Smart Village. STMIK STIKOM Bali.

Okta Karneli, Ruzikna, Kasmarudin & Frini Karina Andini 2019.

Universitas Riau. Sosialisasi dan implementasi program smart village di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singing.

Eko, Sutoro. Dkk. 2021.

Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Sugiman 2018.

Pemerintah Desa. Universitas Suryadarma

Eko,S (2021)

“Government Making: Rebuilding Government Science,” *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1),hal.1-20.
Doi;10.47431/governabilitas.v2i1.109.

Sutoro Eko Yunanto 2021.

Government Making Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan: Governabilitas.Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Indonesia. Volume.2

Sugiyono, 2015.

Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta

Ismi Cahyati, Adji Suradji Muhammad, Edison Edison 2023.

Efektivitas Penerapan E-Government Di Daerah Kepulauan. (Studi pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan jemaja dan jemaja) Jurnal Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jilid 3

Adji Suradji Muhammad, Eka Suswaini, Maullana Chandra Atmajha, Putera Perdana, Analius Giawa 2022.

Digitalisasi Layanan, Upaya Meningkatkan Investasi Daerah. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Indonesia. PT Indonesia Emas Grup.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Definisi Smart Village pasal 78 UU Desa dan UU Desa Pasal 86.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 115/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Sebwang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung
Di Tempat



Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 2 Februari 2023 . Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Marko
No Mhs : 18520190
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebwang Menuju Smart Village
Tempat : Desa Sebwang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Dosen Pembimbing : Dra. Tri Daya Rini, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2023
Ketua


Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 196008010010000000

Lampiran 1.2 Surat Tugas

	YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B
<small>• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B • PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B</small>	<small>• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B • PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A • PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B</small>
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id	
<u>SURAT TUGAS</u> Nomor : 062/I/T/2023	
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:	
Nama	: Marko
Nomor Mahasiswa	: 18520190
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan.
Jenjang	: Sarjana (S-1).
Keperluan	: Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat	: Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
b. Sasaran	: Kesiapan Sumber Daya Aparatur Desa Sebawang Menuju Smart Village
c. Waktu	: 2 Februari 2023
Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.	
Yogyakarta, 1 Februari 2023	
Ketua	
	
Dr. Sutopo Eko Yunanto NIP. 170 230 190	
PERHATIAN : Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.	MENGETAHUI : Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 2.1

PANDUAN WAWANCARA DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DESA SEBAWANG DAN MASYARAKAT

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Umur :

B. PERTANYAAN

1. Apakah benar desa ini sudah menerapkan smart village atau desa cerdas
2. Apakah ada kebijakan dari pemerintah desa atau kabupaten atau kemendes untuk melaksanakan smart village
3. Jika ada bagaimana progam smart village itu dilaksanakan didesa sebang
4. Sejauh mana persiapan perangkat desa sebang dalam melaksanakan program smart village
5. Apakah ada program penguatan perangkat desa dalam melaksanakan smart village
6. Jika ada bagaimana proses pelaksanaan penguatan perangkat desa dalam program smart village
7. Bagaimana pemahaman perangkat desa dalam penerapan program smart village
8. Apakah regulasi yang sudah ada menjawab persoalan peningkatan kualitas perangkat desa sebang
9. Jika ia program apa yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas perangkat desa dalam pelaksanaan smart village
10. Bagaimana partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan smart village
11. Sejauh mana pemanfaatan TIK dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
12. Apakah penggunaan dana desa dipakai untuk meningkatkan kualitas perngkat desa dalam melaksanakan smart village
13. Jika ia bagaimana penggunaan dana desa digunakan untuk peningkatan kualitas perangkat desa dalam smart village

14. Apakah ada fasilitas pendukung yang diberikan kepada perangkat desa dalam melaksanakan smart village, jika ya sejauh mana fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kualitas perangkat dalam melaksanakan program smart village
15. Hambatan apa yang ditemukan terhadap peningkatan kualitas perangkat desa dalam melaksanakan smart village
16. Sejauh mana hambatan tersebut di selesaikan dan apakah mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 3.1 Wawancara Dengan Pemerintah Desa



Dokumentasi Setelah Wawancara



Dokumentasi setelah wawancara



Dokumentasi setelah wawancara



Dokumentasi setelah wawancara

Lampiran 3.2 Dokumentasi Perangkat Digitalisasi



